



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA PANITIA KERJA (PANJA) REVITALISASI BLK DAN  
PENGEMBANGAN KETERAMPILAN KERJA  
KOMISI IX DPR RI KE PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PADA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2018-2019  
TANGGAL 17 S.D 19 MEI 2019**

---

**I. PENDAHULUAN**

UUDN RI tahun 1945 mengamanatkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Perjuangan tersebut kemudian dituangkan dalam Pasal 58 ayat (4) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR-RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR-RI adalah melalui kunjungan kerja. Kunjungan kerja spesifik ini difokuskan pada tugas pengawasan salah satu bidang kerja Komisi IX DPR RI yaitu bidang Ketenagakerjaan. Kunjungan Panitia Kerja Revitalisasi BLK dan Pengembangan Keterampilan Kerja Komisi IX DPR RI ini akan mendalami upaya dan kegiatan pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja. Oleh karena itu kunjungan pengawasan KOMisi IX DPR RI pada masa persidangan ini dilakukan untuk melihat penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagaimana amanat UU.

**A. Latar Belakang**

Saat ini kita memasuki era revolusi industri 4.0 dengan perubahan dan percepatan teknologi yang sangat cepat yang tidak dapat kita hindari. Perkembangan teknologi bisa ini mampu merubah pola hubungan antara manusia di semua sector baik sector social, ekonomi, politik, budaya hukum dan keamanan. Dalam sector ekonomi, dampaknya pada bidang ketenagakerjaan,

akan menjadi ancaman tersendiri bagi tenaga kerja dalam negeri yang tidak memiliki keterampilan untuk beradaptasi dalam pekerjaan-pekerjaan jenis baru dengan system digital. Tenaga kerja manusia yang tidak terampil di sector formal akan digusur oleh tenaga mesin dengan teknologi canggih. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebabkan hilangnya beberapa jenis pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia atau konvensional dan muncul pekerjaan baru. Misalnya pemberlakuan palang otomatis di sejumlah gerbang tol yang sebelumnya dijaga oleh petugas jalan tol. Dalam kasus ini sejumlah pekerjaan yang tergantung seperti penyiapan tiket, pemberian uang kembalian, pengumpulan hasil penjualan tiket dan pencatatan penjualan harian. Begitu juga dengan pabrik-pabrik yang banyak mengganti pekerjanya dengan mesin. Selain itu pada industry ritel, pun dengan Industri tekstil, akan menyumbang pekerja yang akan tergantikan, dimana masuknya system digital dalam produksi pabrik akan mengurangi jumlah pekerja yang bekerja di pabrik. Hal ini sesuai prediksi World Economic Forum dimana ada sekitar 75 juta jenis pekerjaan yang akan hilang<sup>1</sup>, sementara dari jumlah pekerja, ada 300 juta orang di seluruh dunia dan 32 juta orang di Indonesia yang terancam PHK<sup>2</sup> menurut prediksi McKinsey Global Institute.

Mengantisipasi tantangan transformasi ketenagakerjaan tersebut, pemerintah harus memiliki strategi jitu untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang berketerampilan dan berkualitas sehingga dapat menekan jumlah pengangguran dan ledakan jumlah tenaga kerja yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).

## **B. Dasar Kegiatan**

Kunjungan Kerja Panitia Kerja Revitalisasi BLK dan Pengembangan Keterampilan Kerja Komisi IX DPR RI ini merupakan pelaksanaan dari fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 58 ayat (3) huruf d, Pasal 98 dan Pasal 99 Tata Tertib DPR RI 2014 Nomor 1 Tahun 2014 melalui kunjungan kerja. Dan hasil kunjungan ini akan menjadi rekomendasi Panitia

---

<sup>1</sup> Langkah pemerintah hadapi revolusi industry 4.0, 12 Maret 2019, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190312/12/898850/ini-langkah-pemerintah-hadapi-revolusi-industri-4.0>

<sup>2</sup> Revolusi Industri 4.0 mengancam seluruh pekerja di dunia, 28 Desember 2018, <https://www.kompasiana.com/hafiihz63177/5c2589b912ae9451d172e927/revolusi-industri-4-0-mengancam-seluruh-pekerja-di-dunia#>

Kerja kepada pemerintah yang akan dilaporkan dalam rapat Panitia Kerja Revitalisasi BLK dan Pengembangan Keterampilan Kerja Komisi IX DPR RI untuk menjadi masukan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Kementerian Ketenagakerjaan RI.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Kunjungan kerja Panitia Kerja Revitalisasi BLK dan Pengembangan Keterampilan Kerja Komisi IX DPR RI ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi terkait upaya pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam penguatan pelatihan kerja melalui revitalisasi BLK Kulon Progo DI Yogyakarta, dan melihat secara langsung kondisi fisik dan non fisik Balai Latihan Kerja (BLK) serta mendapatkan masukan yang komprehensif terkait program dan kegiatan pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mempersiapkan SDM yang berkualitas melalui pelatihan vocational dalam BLK sehingga dapat menjawab kebutuhan pasar kerja di era revolusi industry 4.0.

### **D. Kegiatan yang dilaksanakan**

Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja Revitalisasi BLK dan Pengembangan Keterampilan Kerja Komisi IX DPR RI dengan Pemerintah daerah dan kepala BLK baik pemerintah provinsi dan Kabupaten Kulon Progo yang didampingi oleh:

1. Bupati Kabupaten Kulon Progo DI Yogyakarta
2. Pejabat Eselon II, Direktur Bina Lembaga pelatihan pada Ditjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan RI
3. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DI Yogyakarta
4. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo DI Yogyakarta
5. Kepala BLK provinsi DI Yogyakarta
6. Kepala BLK Kabupaten Kulon Progo DI Yogyakarta

### **E. Waktu Pelaksanaan**

Kunjungan Kerja Panitia Kerja Revitalisasi BLK dan Pengembangan Keterampilan Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi DI Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 17 – 19 Mei 2019.

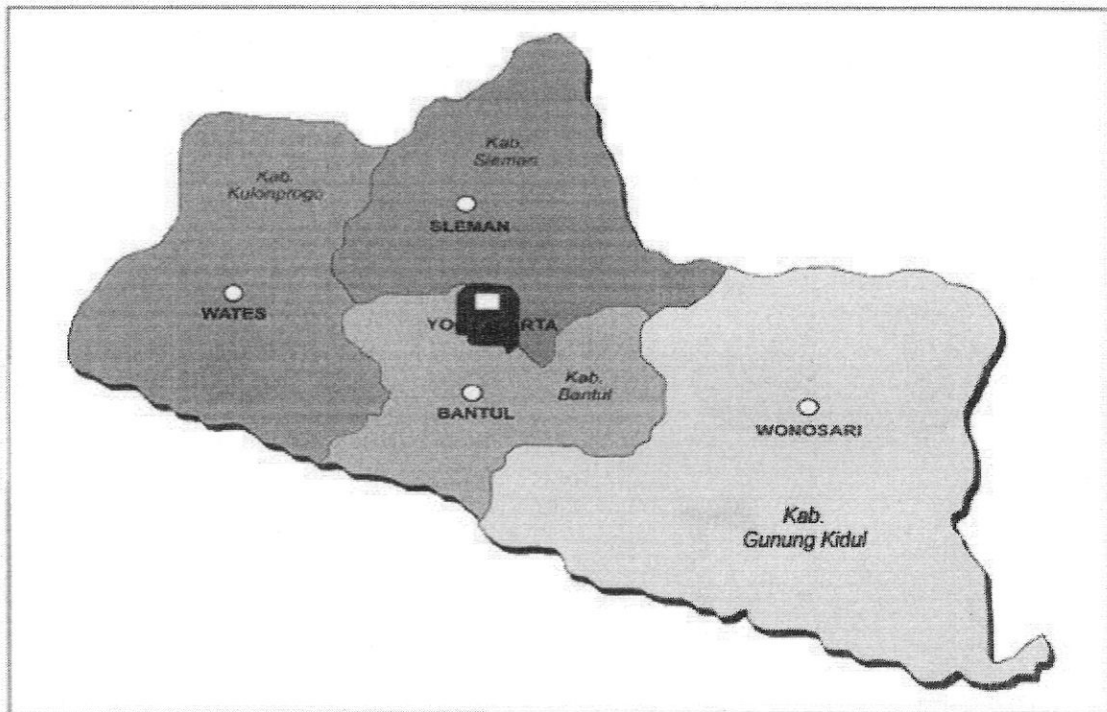
## F. Peserta

### Daftar Terlampir

NO URUT	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	ICHSAN FIRDAUS	KETUA TIM/ WK KOMISI IX	F-PG
2.	Dra. Hj. ERMALENA MHS	WK KOMISI IX	F-PPP
3.	Hj. ELVA HARTATI, S.IP., MM.	ANGGOTA	F-PDIP
4.	dr. RIBKA TJIPTANING	ANGGOTA	F-PDIP
5.	ABIDIN FIKRI, SH.	ANGGOTA	F-PDIP
6.	H. SYAMSUL BACHRI, M.Sc.	ANGGOTA	F-PG
7.	DR. SUMARJATI ARJOSO, SKM	ANGGOTA	F-GERINDRA
8.	Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, SE.	ANGGOTA	F-PD
9.	H. HAERUDIN, S.Ag., MH	ANGGOTA	F-PAN
10.	HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN, SH.	ANGGOTA	F-PAN
11.	H. HANDAYANI, SKM	ANGGOTA	F-PKB
12.	dr. H. ADANG SUDRAJAT, MM. AV.	ANGGOTA	F-PKS
13.	H. MUHAMMAD IQBAL, SE., M.Com	ANGGOTA	F-PPP
14.	IRMA SURYANI	ANGGOTA	F-NASDEM
15.	AMELIA ANGGRAINI	ANGGOTA	F-NASDEM

## II. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO DI YOGYAKARTA

### PETA KABUPATEN KULON PROGO DI YOGYAKARTA



### SEKILAS TENTANG KABUPATEN KULON PROGO

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten dari lima kabupaten/kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat. Batas Kabupaten Kulon Progo di sebelah timur yaitu Kabupaten Bantul

dan Kabupaten Sleman, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo sebanyak 444.947 jiwa.

Luas wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah 58.627,54 hektar, secara administratif terbagi menjadi 12 kecamatan yang meliputi 88 desa dan 930 dusun. Topografi wilayah meliputi zone pegunungan 25.096 Ha (42,80%), Zone Bergelombang 25.878 Ha (44,14%), dan Zone Darat 7.653 Ha (13,08%).

*Sumber: data BPS*

### **GAMBARAN UMUM BLK KULON PROGO**



BLK Kulonprogo merupakan BLK UPTD, yang sudah berdiri selama lebih dari 30 tahun dengan luas areal 2 Ha dengan kapasitas latih sebanyak 1968 orang. Sejak tahun 2018 lalu, menitikberatkan pada upaya mencetak SDM di bidang kebandarudaraan melalui pelatihan kargo, layanan tiket dan pemesanan. Namun dalam menyambut bandara udara Internasional Yogyakarta (NYIA) di Temon. Sementara bila melihat dari potensi daerah yaitu pada bidang pertambangan dan penggalian, sehingga kejuruan unggulan BLK adalah bidang las industry, garmen apparel.

Dalam mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Kulon Progo, pemerintah kabupaten Kulon Progo melalui UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo memberi kesempatan kepada



masyarakat/pencari kerja di wilayah Kabupaten Kulon Progo, untuk mengikuti Program Pelatihan Keterampilan diberbagai bidang kejuruan, yaitu pada 29 keterampilan termasuk pelatihan kebandarudaraan dalam rangka pemenuhan SDM dengan dibukanya New Yogyakarta International airport (NYIA) per April 2019, seperti pelatihan pramugari, Basic Aviation Security, Ground Staff, Cargo Staff, Airlines Staff, Ticketing and Reservation, Pasasi dan Facility Care.

### **PROGRAM REVITALISASI BLK KULON PROGO**

Peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam hal ini dinas tenaga kerja dan transmigrasi dalam upaya revitalisasi BLK yaitu melakukan perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana. Tahun 2016, pemerintah daerah DI Yogyakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.5,9 Milyar untuk merehabilitasi gedung BLK Kulon Progo.

Dalam tiga tahun terakhir (2016-2018), BLK Kulon Progo telah menempatkan 422 orang lulusan pelatihan. Program kegiatan yang dilakukan dalam menjawab kebutuhan pasar kerja di Kulon Progo dan DI Yogyakarta yaitu melalui program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan kegiatan pengembangan produktivitas bagi tenaga kerja perusahaan sebagai akibat adanya persaingan di dunia usaha. Pelatihan tersebut yaitu pelatihan keterampilan pencari kerja, pelatihan pembentukan wirausaha baru dan pelatihan keterampilan Mobil Training Unit (MTU). Penyelenggaraan program pelatihan dilaksanakan dengan menggunakan dana APBN dan APBD.

Dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan pekerja, pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo telah menjalin kerjasama (MoU) dengan beberapa perusahaan sebagai tempat On the Job Training, pemberian motivasi dan pengukuran produktivitas. Sementara kerjasama dengan instansi lain yaitu dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam kegiatan pelatihan dilakukan crosscutting untuk memperkaya wawasan dan meningkatkan keberhasilan sehingga siap pakai dan mampu berwirausaha sebagaimana salah satu tujuan dilakukannya revitalisasi BLK yaitu membentuk wirausaha baru bagi lulusan BLK.

### III TEMUAN-TEMUAN

1. Saat ini Kabupaten Kulon Progo memiliki peluang kerja yang besar yang dapat menyerap banyak tenaga kerja terutama setelah dibukanya Bandar Udara Internasional baru (NYIA) di Yogyakarta. Namun peluang tersebut perlu diselaraskan dengan kesiapan BLK sebagai ujung tombak penciptaan SDM yang berkualitas sesuai kebutuhan pasar kerja.
2. BLK Kulon Progo masih kekurangan tenaga instruktur. Tahun 2019, jumlah tenaga instruktur hanya 12 orang. Jumlah tersebut berkurang dibanding tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan kebutuhan instruktur dilihat dari 16 kejuruan yang ada, maka BLK Kulon Progo masih kekurangan tenaga instruktur sebanyak 42 orang. Kebutuhan jumlah tenaga instruktur tersebut tergantung ketersediaan yang diberikan dari pusat yaitu Kementerian Ketenagakerjaan RI.
3. SDM instruktur di Kulon Progo sebagian besar telah berusia di atas 50 tahun yang telah memasuki usia pensiun dan kurang update dengan perkembangan teknologi.
4. Permasalahan lain mengenai kurangnya tenaga instruktur di daerah yaitu keterbatasan alokasi anggaran pemerintah daerah untuk membayar gaji instruktur. Dan perlu menjadi pertimbangan pemberian bantuan anggaran gaji instruktur oleh pusat bagi instruktur yang berstatus pegawai pusat, namun penggajian dilakukan oleh daerah.
5. Salah satu kendala bagi calon pekerja tidak dapat bekerja saat ini adalah kendala bahasa. Namun dari total kebutuhan instruktur tahun 2019 yaitu 42 orang, instruktur Bahasa tidak dimasukkan dalam daftar yang dibutuhkan.
6. Manfaat dibangunnya bandar udara New Yogyakarta International Airport (NYIA) membuka peluang besar penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Kulon Progo yaitu mencapai 165 ribu tenaga kerja atau 40 persen dari total penduduk yang ada.
7. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, total jumlah lulusan pelatihan di BLK Kulon Progo adalah sebanyak 2.888 orang peserta dimana hanya 422 orang lulusan atau 20 persen lebih yang dapat ditempatkan.

#### IV. KESIMPULAN

1. Dalam menghadapi revolusi industry 4.0, pemerintah kabupaten Kulon Progo terus berupaya mempersiapkan SDM yang memiliki keterampilan dan kualitas yang baik dalam mengisi lapangan kerja terutama dengan dibangunnya Bandar udara New Yogyakarta International Airport (NYIA) dengan kebutuhan pekerja mencapai 40 persen dari jumlah penduduk, belum lagi kebutuhan di sector lain seperti sector pariwisata maupun sector lainnya yang mana kebutuhan tenaga kerja akan sangat banyak.
2. Pemberdayaan BLK di Kulon Progo harus difokuskan pada peningkatan skill atau kualitas SDM sehingga penduduk Kulon Progo diharapkan tidak hanya sebagai penonton, tapi menjadi pelaku dalam pengisian peluang kerja bahkan posisi strategis baik dalam maupun di luar Kulon Progo.
3. Seiring pembangunan bandar udara Internasional baru di Yogyakarta (NYIA), harus dimanfaatkan oleh pencari kerja bukan hanya sekedar mengisi kekosongan peluang kerja, namun dapat diimbangi dengan peningkatan kompetensi yang baik pula.
4. Upaya peningkatan tenaga instruktur telah diupayakan sejak tahun 2014, dimana dari 1.000 tenaga instruktur yang diusulkan baru 600 yang berhasil disetujui. Untuk Kabupaten Kulon Progo sendiri baru mendapatkan penambahan 4 (empat) orang tenaga instruktur.
5. Terkait tidak adanya kebutuhan instruktur bahasa, dalam daftar kebutuhan instruktur tahun 2019 pada BLK Kulon Progo, pemerintah daerah mengambil langkah melalui program social worker bagi pelajar yang menjadi penterjemah bagi orang asing yang kemudian diberikan sertifikat. Selain itu juga melalui program *people to people contact*, dan pertukaran mahasiswa. Melalui program tersebutlah pemerintah mendapatkan tenaga instruktur swasta sehingga tidak perlu meminta ke pemerintah pusat.
6. Melihat kondisi BLK Kulon Progo, maka Komisi IX DPR RI meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan perhatian terhadap kondisi fisik melalui dukungan penyiapan sarana dan prasarana serta pemenuhan bantuan peralatan BLK Kulon Progo mengingat terbatasnya anggaran untuk pembangunan fisik BLK



## **V. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ini disampaikan.

Jakarta, 20 Mei 2019

**TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK  
PANITIA KERJA REVITALISASI BLK DAN PENGEMBANGAN KETERAMPILAN  
KERJA KOMISI IX DPR RI KE PROVINSI D I YOGYAKARTA  
KETUA TIM,**

**Ttd**

**DEDE YUSUF MACAN EFFENDI**

**A-415**